

PELAYANAN PUBLIK DALAM BAYANG-BAYANG TAMBANG: DILEMA KEBIJAKAN PARIWISATA DI RAJA AMPAT

Muhamad Khofa Nurzaman^{1)*}, Fathurahman Ghani

UIN Sunan Gunung Djati Bandung¹⁾

Email: mkhofa15@gmail.com*

Riwayat Artikel

Diterima: 16 Januari 2025

Disetujui: 18 Februari 2025

Diterbitkan: 3 Maret 2025

Abstract

This study examines the policy dilemma between mining downstreaming and sustainable tourism in Raja Ampat, which has led to a public service crisis. The urgency lies in the need for governance that balances economic, ecological, and social interests. Drawing on Public Service, Governance, and Sustainable Development theories, this research aims to analyze how public services operate amid policy conflicts and assess the implementation of transparency, participation, and indigenous rights protection. A qualitative case study method was employed through interviews, observations, and documentation. The findings reveal that public service in Raja Ampat remains undemocratic and biased toward industrial interests, with weak accountability and community participation. The study highlights the necessity of public service reform grounded in collaborative governance and ecological justice.

Keywords: Public service, Governance, Sustainable tourism

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh dilema kebijakan antara hilirisasi pertambangan dan pariwisata berkelanjutan di Raja Ampat yang menimbulkan krisis pelayanan publik. Urgensi penelitian ini terletak pada perlunya tata kelola publik yang mampu menyeimbangkan kepentingan ekonomi, ekologi, dan sosial. Menggunakan teori Pelayanan Publik, Tata Kelola Pemerintahan, dan Pembangunan Berkelanjutan, penelitian ini bertujuan menganalisis bagaimana pelayanan publik berfungsi di tengah konflik kebijakan serta sejauh mana prinsip transparansi, partisipasi, dan perlindungan hak masyarakat adat diterapkan. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan studi kasus melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelayanan publik di Raja Ampat belum demokratis dan masih berpihak pada kepentingan industri, dengan lemahnya akuntabilitas dan partisipasi masyarakat. Penelitian ini menegaskan pentingnya reformasi pelayanan publik berbasis kolaborasi dan keadilan ekologis.

Kata kunci: Pelayanan publik, Tata kelola, Pariwisata berkelanjutan

A. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara yang dikenal dengan kekayaan sumber daya alam dan keanekaragaman hayati yang tinggi, yang menjadi modal penting bagi pembangunan ekonomi nasional (Qasthary, Auzaan, & Alamsyah, 2025). Dalam konteks tata kelola publik, kekayaan alam ini menuntut adanya kebijakan yang mampu menyeimbangkan antara kepentingan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan (Jati, 2021). Namun, dalam praktiknya, kebijakan pengelolaan sumber daya alam sering kali lebih berpihak pada pertumbuhan ekonomi jangka pendek dibandingkan pelestarian ekologi (International Journal of Business

Law [IJBL], 2024). Kondisi ini memperlihatkan lemahnya implementasi prinsip good governance dalam sektor sumber daya alam yang seharusnya menekankan transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas publik (IJBL, 2024). Akibatnya, muncul berbagai konflik kepentingan antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat lokal yang bergantung pada keberlanjutan lingkungan.

Lebih jauh, hubungan antara kebijakan pembangunan dan pelayanan publik menunjukkan dinamika yang kompleks di daerah-daerah dengan potensi ekonomi tinggi. Pemerintah sering menghadapi dilema dalam menentukan prioritas antara eksploitasi sumber daya alam dan penyediaan layanan publik yang adil bagi masyarakat sekitar (Hidayati, 2021). Sejumlah studi menunjukkan bahwa daerah kaya sumber daya alam justru mengalami paradoks kemiskinan dan ketimpangan pelayanan publik akibat kebijakan yang bias terhadap investasi dan pertumbuhan ekonomi (Qasthary et al., 2025). Dalam konteks ini, pelayanan publik tidak hanya dipahami sebagai penyediaan layanan dasar, tetapi juga sebagai wujud dari keadilan distributif dan pengakuan terhadap hak masyarakat adat (Herdiana & Humaedi, 2024). Dengan demikian, tata kelola publik menjadi instrumen utama dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan di daerah konservasi seperti Raja Ampat.

Fenomena ini tercermin nyata di Raja Ampat, Papua Barat Daya, yang selama ini dikenal sebagai ikon pariwisata bahari Indonesia namun kini menghadapi ancaman dari ekspansi industri pertambangan. Aktivitas penambangan nikel yang mulai berlangsung di wilayah ini memicu kekhawatiran akan degradasi lingkungan laut serta berpotensi menurunkan kualitas destinasi wisata. Dalam situasi ini, pelayanan publik menjadi ujian bagi negara untuk menunjukkan keberpihakan terhadap masyarakat lokal dan prinsip pembangunan berkelanjutan. Kurangnya keterlibatan masyarakat dalam proses perizinan dan lemahnya pengawasan terhadap kebijakan pertambangan memperlihatkan adanya krisis tata kelola di sektor publik. Oleh karena itu, permasalahan utama yang difokuskan dalam penelitian ini adalah bagaimana pelayanan publik beroperasi di tengah benturan kebijakan antara pariwisata berkelanjutan dan eksploitasi sumber daya alam di Raja Ampat.

Sejumlah penelitian sebelumnya turut menyoroiti dilema tata kelola di kawasan konservasi yang dihadapkan pada tekanan ekonomi ekstraktif. Hidayati (2021) menemukan bahwa kebijakan pembangunan pariwisata di daerah konservasi sering kali gagal karena kurangnya partisipasi masyarakat lokal dalam perumusan kebijakan publik. Rahardjo dan Setiawan (2022, sebagaimana dikutip dalam Qasthary et al., 2025) menunjukkan bahwa lemahnya koordinasi antarlembaga pemerintah memperparah konflik kepentingan antara industri tambang dan sektor pariwisata di wilayah timur Indonesia. Sementara itu, penelitian Herdiana dan Humaedi (2024) mengungkapkan bahwa pelayanan publik yang tidak adaptif terhadap kebutuhan masyarakat adat dapat menimbulkan ketimpangan sosial dan menurunkan kepercayaan terhadap pemerintah daerah. Ketiga penelitian ini memberikan gambaran bahwa tata kelola publik di daerah berpotensi wisata masih menghadapi tantangan besar dalam menyeimbangkan agenda ekonomi, sosial, dan konservasi lingkungan.

Penelitian ini memiliki persamaan dengan studi-studi terdahulu, yakni sama-sama menyoroiti pentingnya tata kelola dan pelayanan publik yang berkeadilan dalam konteks kebijakan pembangunan di daerah sensitif secara ekologis. Namun, penelitian ini berbeda dalam fokus dan sudut pandang analisis. Jika penelitian sebelumnya cenderung menyoroiti aspek kelembagaan dan partisipasi masyarakat secara umum, maka penelitian ini menempatkan pelayanan publik sebagai arena dilema kebijakan antara pariwisata berkelanjutan dan pertambangan di Raja Ampat, dengan menekankan pada dimensi keadilan, transparansi kebijakan, dan perlindungan masyarakat adat sebagai indikator utama kualitas layanan publik.

Perbedaan tersebut menjadi dasar originalitas penelitian ini, yang berupaya mengisi kekosongan literatur terkait pelayanan publik dalam konteks tumpang tindih kebijakan ekonomi dan konservasi di kawasan pesisir. Penelitian ini tidak hanya menelaah aspek normatif dari tata kelola publik, tetapi juga memetakan bagaimana kebijakan pertambangan memengaruhi mekanisme pelayanan publik di tingkat lokal, khususnya dalam konteks konflik antara negara, masyarakat adat, dan pelaku industri. Dengan demikian, penelitian ini berkontribusi pada pengembangan perspektif baru tentang *governance under conflict*, di mana pelayanan publik menjadi instrumen utama untuk menilai legitimasi kebijakan pembangunan di wilayah konservasi.

Berdasarkan uraian tersebut, urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan untuk meninjau ulang paradigma pelayanan publik di daerah dengan karakteristik sumber daya alam yang rentan terhadap eksploitasi. Dalam konteks Raja Ampat, urgensi ini semakin kuat mengingat kawasan tersebut tidak hanya memiliki nilai ekonomi yang tinggi dari pariwisata, tetapi juga berperan penting dalam menjaga stabilitas ekologi laut global. Ketika kebijakan publik justru menimbulkan degradasi lingkungan dan ketimpangan sosial, maka perlu dilakukan refleksi kritis terhadap bagaimana pelayanan publik dijalankan—apakah benar-benar berpihak pada kepentingan rakyat atau hanya memperkuat struktur kekuasaan ekonomi.

Oleh karena itu, tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana pelayanan publik berfungsi di tengah konflik kebijakan antara sektor pariwisata dan pertambangan di Raja Ampat, dengan fokus pada aspek transparansi, partisipasi masyarakat, dan perlindungan hak-hak masyarakat adat. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana kebijakan publik yang diterapkan mencerminkan prinsip keadilan dan keberlanjutan, serta memberikan rekomendasi kebijakan yang dapat memperkuat tata kelola pelayanan publik di wilayah konservasi Indonesia.

B. KAJIAN PUSTAKA

Pelayanan Publik (*Public Service Theory*)

Teori pelayanan publik berangkat dari gagasan bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menyediakan layanan yang memenuhi kebutuhan dasar masyarakat secara adil, efektif, dan berorientasi pada kepentingan publik (Denhardt & Denhardt, 2015). Pelayanan publik tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga merupakan perwujudan dari nilai-nilai demokrasi seperti partisipasi, akuntabilitas, dan keadilan sosial. Dalam paradigma *New Public Service*, masyarakat tidak dipandang sebagai konsumen melainkan sebagai warga negara yang memiliki hak untuk berpartisipasi dalam proses pelayanan (Denhardt, 2011). Oleh karena itu, fokus pelayanan publik terletak pada upaya membangun kepercayaan, kolaborasi, dan keterlibatan warga dalam setiap proses kebijakan publik. Paradigma ini menolak orientasi pasar dari *New Public Management* dan menekankan pentingnya etika serta orientasi pada kepentingan bersama. Indikator Teori Pelayanan Publik:

- Keterlibatan masyarakat dalam proses pelayanan.
- Transparansi dan akuntabilitas penyelenggara layanan.
- Keadilan dan kesetaraan dalam distribusi manfaat publik.
- Orientasi nilai (*value-driven governance*) dibanding efisiensi semata.

Tata Kelola Pemerintahan (*Governance Theory*)

Teori tata kelola pemerintahan menjelaskan bagaimana pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil saling berinteraksi untuk mencapai tujuan publik melalui mekanisme yang partisipatif dan transparan (Rhodes, 1996). *Governance* tidak hanya menekankan pada peran negara, tetapi juga mengakui pentingnya kolaborasi antarpemangku kepentingan dalam penyusunan dan implementasi kebijakan publik. Dalam konteks modern, tata kelola yang baik (*good governance*) menjadi indikator utama legitimasi pemerintahan melalui prinsip

transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan supremasi hukum (Kooiman, 2003). Pendekatan ini menolak konsep pemerintahan yang hierarkis dan menggantinya dengan model jaringan (network governance) yang lebih adaptif dan inklusif. Dengan demikian, governance menjadi instrumen penting dalam menjembatani kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan di era kebijakan pembangunan berkelanjutan. Indikator Teori Tata Kelola Pemerintahan:

- Prinsip transparansi dan akuntabilitas kebijakan.
- Partisipasi aktif masyarakat dan lembaga non-pemerintah.
- Kolaborasi lintas sektor dan koordinasi antarlembaga.
- Supremasi hukum dan keadilan dalam pelaksanaan kebijakan.

Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Theory*)

Teori pembangunan berkelanjutan menekankan bahwa pembangunan harus memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri (*World Commission on Environment and Development*, 1987). Pendekatan ini memadukan dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam satu kerangka kebijakan yang seimbang dan saling mendukung (Sachs, 2015). Dalam teori ini, kesejahteraan masyarakat tidak hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari kualitas lingkungan dan keadilan sosial yang dihasilkan oleh kebijakan publik. Oleh karena itu, pembangunan yang berkelanjutan menuntut adanya sinergi antara efisiensi ekonomi dan konservasi lingkungan melalui tata kelola publik yang responsif (Todaro & Smith, 2020). Penerapan teori ini sangat relevan dalam konteks daerah seperti Raja Ampat yang menghadapi benturan antara eksploitasi sumber daya alam dan pelestarian pariwisata berkelanjutan. Indikator Teori Pembangunan Berkelanjutan:

- Keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan pelestarian lingkungan.
- Perlindungan terhadap hak-hak masyarakat lokal/adat.
- Keadilan sosial dalam distribusi hasil pembangunan.
- Integrasi antara kebijakan lingkungan, ekonomi, dan sosial.

C. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus (case study method). Pendekatan ini dipilih karena sesuai untuk memahami fenomena kompleks yang terjadi dalam konteks sosial, politik, dan kelembagaan tertentu secara mendalam (Creswell, 2014). Metode studi kasus memungkinkan peneliti untuk menelaah secara detail dinamika pelayanan publik di tengah benturan kebijakan antara pariwisata berkelanjutan dan industri pertambangan di Raja Ampat. Selain itu, metode ini relevan karena memberikan ruang bagi peneliti untuk menggali persepsi, pengalaman, dan praktik aktor-aktor lokal, seperti masyarakat adat, pemerintah daerah, dan pihak swasta (Yin, 2018). Dengan demikian, metode ini mampu memberikan gambaran holistik tentang bagaimana kebijakan publik dijalankan dalam kondisi konflik kepentingan sumber daya.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui tiga tahapan utama: (1) wawancara mendalam (in-depth interview), (2) observasi lapangan, dan (3) studi dokumentasi. Wawancara mendalam dilakukan terhadap informan kunci yang terdiri dari pejabat pemerintah daerah, tokoh masyarakat adat, pelaku pariwisata, dan perwakilan organisasi lingkungan. Observasi dilakukan untuk memahami konteks sosial dan kondisi nyata di lapangan, khususnya di wilayah yang terdampak aktivitas pertambangan dan pariwisata. Studi dokumentasi meliputi analisis terhadap peraturan daerah, laporan pemerintah, berita media, serta dokumen perusahaan pertambangan dan pariwisata yang relevan. Triangulasi data digunakan untuk memastikan validitas dan keabsahan informasi yang diperoleh dari berbagai sumber (Miles, Huberman, & Saldaña, 2014).

Teknik sampling yang digunakan adalah purposive sampling, yaitu pemilihan informan secara sengaja berdasarkan pengetahuan dan keterlibatan mereka terhadap isu yang diteliti (Patton, 2015). Pendekatan ini dipilih karena peneliti membutuhkan informan yang memahami secara mendalam dinamika kebijakan dan pelayanan publik di Raja Ampat. Informan utama meliputi perwakilan dari Dinas Pariwisata, Dinas Lingkungan Hidup, masyarakat adat, LSM lingkungan, serta pihak industri. Jumlah informan ditentukan berdasarkan prinsip data saturation, yaitu ketika informasi yang diperoleh telah dianggap cukup dan tidak menghasilkan temuan baru.

Analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik analisis tematik (thematic analysis). Tahapan analisis mencakup proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan sebagaimana dikemukakan oleh Miles dan Huberman (1994). Analisis tematik digunakan untuk mengidentifikasi pola, tema, dan hubungan antar konsep yang muncul dari data empiris, terutama yang berkaitan dengan transparansi, partisipasi, dan keadilan dalam pelayanan publik. Hasil analisis kemudian diinterpretasikan dengan mengaitkannya pada teori pelayanan publik, teori tata kelola pemerintahan, dan teori pembangunan berkelanjutan yang telah dibahas sebelumnya, sehingga menghasilkan pemahaman yang komprehensif terhadap dilema kebijakan di Raja Ampat.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dilema Kebijakan Antara Hilirisasi Pertambangan dan Keberlanjutan Pariwisata di Raja Ampat

Konflik kebijakan antara hilirisasi pertambangan dan keberlanjutan pariwisata di Raja Ampat menunjukkan adanya ketidaksinkronan arah pembangunan antara pemerintah pusat dan daerah. Pemerintah pusat menekankan nilai tambah ekonomi melalui ekspor hasil tambang, sedangkan pemerintah daerah memprioritaskan konservasi dan pariwisata sebagai pilar ekonomi jangka panjang. Ketegangan ini mencerminkan kelemahan dalam mekanisme koordinasi lintas sektor dan lemahnya komunikasi kebijakan antarlevel pemerintahan. Ketidakharmonisan tersebut memperlihatkan bahwa keputusan strategis yang diambil di tingkat nasional sering kali tidak mempertimbangkan konteks sosial-ekologis di daerah. Akibatnya, kebijakan yang seharusnya menciptakan keseimbangan antara pembangunan dan pelestarian justru menimbulkan fragmentasi tata kelola dan mengancam stabilitas ekonomi lokal.

Secara lebih mendalam, dilema ini memperlihatkan bahwa paradigma pembangunan yang berorientasi pada eksploitasi sumber daya masih mendominasi kebijakan nasional, sementara prinsip keberlanjutan belum menjadi landasan utama dalam perumusan kebijakan publik. Upaya Kementerian Pariwisata untuk melindungi kawasan konservasi menjadi langkah korektif terhadap praktik pertambangan yang tidak memperhatikan daya dukung lingkungan. Namun, tindakan ini belum cukup tanpa adanya integrasi kebijakan yang tegas dan koordinasi antara sektor energi, lingkungan, dan pariwisata. Ketidakseimbangan kepentingan ini memperlihatkan bahwa keberhasilan tata kelola tidak hanya bergantung pada kebijakan yang dibuat, tetapi juga pada kemampuan negara menciptakan sinergi antarsektor yang menjamin keberlanjutan sosial, ekonomi, dan ekologis bagi masyarakat Raja Ampat.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dilema kebijakan antara hilirisasi pertambangan dan keberlanjutan pariwisata di Raja Ampat mencerminkan ketidaksinergisan antarlevel pemerintahan dan lemahnya koordinasi lintas sektor dalam tata kelola pembangunan. Kondisi ini berbeda dengan temuan Rahardjo dan Setiawan (2022) yang menyatakan bahwa efektivitas tata kelola kolaboratif di sektor pariwisata daerah dapat tercapai apabila terdapat integrasi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah. Dalam konteks Raja Ampat, koordinasi tersebut justru gagal diwujudkan karena keputusan strategis di tingkat pusat lebih menekankan pada agenda ekonomi nasional dibandingkan kepentingan ekologis daerah.

Temuan ini juga bertolak belakang dengan penelitian Wicaksono, Subagiyo, dan Prayitno (2021) yang menemukan bahwa keberhasilan pengelolaan daerah wisata bergantung pada partisipasi masyarakat dan kejelasan pembagian kewenangan antaraktor kebijakan. Di Raja Ampat, absennya koordinasi semacam ini memperlihatkan bahwa kebijakan publik masih didominasi oleh pendekatan top-down yang mengabaikan konteks lokal dan kapasitas kelembagaan daerah.

Selain itu, hasil penelitian ini juga mengoreksi pandangan Doni, Sari, dan Lubis (2023) yang menilai bahwa partisipasi masyarakat dalam pelayanan publik dapat berjalan efektif apabila disertai transparansi dan akuntabilitas institusional yang kuat. Fakta di lapangan justru menunjukkan bahwa mekanisme pengawasan dan keterbukaan informasi di Raja Ampat belum berjalan optimal, sehingga prinsip keberlanjutan sulit diimplementasikan secara konsisten. Perbedaan ini menegaskan bahwa problem utama bukan terletak pada substansi kebijakan hilirisasi itu sendiri, melainkan pada lemahnya sistem tata kelola yang mendasarinya. Dengan demikian, penelitian ini memperluas perspektif sebelumnya dengan menunjukkan bahwa konflik kebijakan di daerah konservasi seperti Raja Ampat bukan semata persoalan ekonomi, tetapi juga krisis koordinasi, integritas kelembagaan, dan keadilan tata kelola antaraktor pembangunan.

Krisis Pelayanan Publik dalam Transparansi dan Perlindungan Hak Masyarakat Adat

Pelayanan publik di Raja Ampat menghadapi tantangan serius akibat tumpang tindih kepentingan antara kebijakan pertambangan dan pelestarian lingkungan. Kondisi ini memperlihatkan kesenjangan antara idealisme tata kelola publik dengan praktik di lapangan. Tabel berikut menyajikan perbandingan antara kondisi normatif dan realitas empiris pelayanan publik di wilayah tersebut:

Tabel 1. Analisis Krisis Pelayanan Publik dalam Aspek Transparansi dan Perlindungan Hak Masyarakat Adat di Raja Ampat

Aspek Pelayanan Publik	Kondisi Ideal (Normatif)	Temuan di Lapangan (Empiris)	Dampak terhadap Masyarakat Adat dan Kepercayaan Publik	Implikasi bagi Tata Kelola Publik
Transparansi Kebijakan	Informasi izin pertambangan, AMDAL, dan keputusan pemerintah disampaikan terbuka kepada publik.	Proses perizinan tambang tidak dipublikasikan secara lengkap; dokumen lingkungan sulit diakses masyarakat.	Menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan meningkatnya kecurigaan terhadap kebijakan publik.	Pemerintah gagal menerapkan prinsip good governance dan akuntabilitas publik secara konsisten.
Partisipasi Masyarakat	Masyarakat lokal dan adat dilibatkan dalam konsultasi	Proses konsultasi minim; aspirasi masyarakat adat tidak	Terjadi resistensi dan konflik sosial antara masyarakat	Lemahnya mekanisme bottom-up policy making memperburuk

	publik sebelum izin diterbitkan.	dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan.	adat dan pihak industri.	legitimasi kebijakan.
Perlindungan Hak Ulayat	Pemerintah menjamin hak kepemilikan tanah dan sumber daya masyarakat adat.	Aktivitas tambang memasuki wilayah adat tanpa izin komunitas lokal.	Hilangnya sumber ekonomi tradisional dan identitas budaya masyarakat adat.	Tata kelola publik kehilangan fungsi protektif dan cenderung pro-korporasi.
Akuntabilitas Pemerintah	Pemerintah bertanggung jawab menindak pelanggaran lingkungan dan penyalahgunaan izin.	Tidak ada sanksi tegas terhadap pelanggaran perusahaan tambang; lemahnya pengawasan lapangan.	Meningkatnya kerusakan ekosistem dan hilangnya sumber penghidupan masyarakat pesisir.	Mengindikasikan governance gap antara regulasi dan implementasi kebijakan di lapangan.
Keadilan Sosial dan Pelayanan Setara	Layanan publik menjamin akses dan manfaat yang sama bagi seluruh warga, termasuk masyarakat adat.	Keputusan kebijakan lebih mengutamakan kepentingan industri pertambangan.	Ketimpangan sosial-ekonomi antara masyarakat lokal dan pelaku industri.	Reformasi pelayanan publik diperlukan untuk memperkuat nilai keadilan dan kesetaraan.

Sumber: Diolah Peneliti, 2025

Analisis terhadap tabel menunjukkan bahwa pelayanan publik di Raja Ampat mengalami disfungsi serius dalam menjalankan prinsip-prinsip dasar tata kelola pemerintahan yang baik. Ketimpangan antara kondisi ideal dan temuan empiris memperlihatkan bahwa aspek transparansi, partisipasi, serta perlindungan hak masyarakat adat belum terimplementasi secara efektif. Proses perizinan tambang yang tertutup dan minimnya konsultasi publik menjadi bukti lemahnya akuntabilitas dan mekanisme representatif pemerintah terhadap masyarakat lokal. Pelayanan publik yang seharusnya menjadi sarana keadilan sosial justru terdistorsi menjadi alat legitimasi kepentingan ekonomi korporasi. Kondisi ini menimbulkan dampak sosial-ekonomi yang luas, termasuk hilangnya mata pencaharian masyarakat adat, meningkatnya konflik sosial, dan menurunnya kepercayaan publik terhadap negara. Secara keseluruhan, hasil analisis ini menegaskan perlunya reformasi pelayanan publik berbasis transparansi, kolaborasi, dan perlindungan hak ulayat agar tata kelola pembangunan di Raja Ampat dapat berjalan secara adil dan berkelanjutan.

Hasil penelitian ini memperkuat temuan Fachruddin, Asriani, dan Ode Rosmina (2023) yang menyatakan bahwa lemahnya transparansi dan minimnya partisipasi masyarakat dalam

proses kebijakan menjadi penyebab utama krisis legitimasi pelayanan publik di daerah kaya sumber daya alam. Namun, hasil ini berbeda dengan penelitian Asnawi dan Sa'diyah (2025) yang menunjukkan bahwa pelayanan publik yang berbasis partisipasi masyarakat dapat meningkatkan kepercayaan warga dan memperkuat kolaborasi dalam tata kelola pemerintahan lokal. Selain itu, studi ini juga sejalan dengan temuan Sunarti, Damayanti, Esariti, Rahdriawan, dan Medina (2022) yang menegaskan bahwa partisipasi aktif masyarakat lokal merupakan faktor penting dalam keberhasilan pembangunan wisata berkelanjutan. Dengan demikian, penelitian ini memperkuat pandangan bahwa krisis pelayanan publik di Raja Ampat bukan semata persoalan teknokratis, melainkan mencerminkan kegagalan struktural dalam mewujudkan tata kelola yang demokratis dan berkeadilan.

Transformasi Pelayanan Publik Menuju Tata Kelola Pariwisata Berkelanjutan

Transformasi pelayanan publik di Raja Ampat menandai perubahan penting dalam paradigma tata kelola daerah, dari yang semula berorientasi pada eksploitasi sumber daya menuju pendekatan yang lebih berkelanjutan dan partisipatif. Pemerintah mulai menunjukkan kesadaran baru dengan meninjau ulang izin-izin pertambangan yang merusak ekosistem dan memperkuat posisi pariwisata hijau sebagai pilar pembangunan utama. Langkah-langkah seperti pembentukan kawasan ekonomi khusus berbasis konservasi dan peningkatan peran masyarakat lokal mencerminkan pergeseran nilai dari sekadar pertumbuhan ekonomi menuju keseimbangan antara kepentingan sosial, ekonomi, dan ekologi. Transformasi ini bukan hanya reformasi kebijakan teknis, tetapi juga perubahan orientasi moral dalam memahami pelayanan publik sebagai sarana untuk menegakkan keadilan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.

Namun, upaya transformasi ini masih menghadapi tantangan besar dalam hal konsistensi implementasi dan keberlanjutan komitmen antarpemangku kepentingan. Perbedaan kepentingan antara pemerintah pusat, daerah, dan sektor swasta masih menjadi hambatan utama dalam mewujudkan tata kelola kolaboratif yang inklusif. Selain itu, keterlibatan masyarakat adat belum sepenuhnya diinstitusionalisasikan dalam proses pengambilan keputusan, sehingga potensi kearifan lokal sebagai fondasi konservasi belum teroptimalkan. Untuk itu, transformasi pelayanan publik di Raja Ampat memerlukan penguatan kapasitas birokrasi, kemauan politik yang konsisten, dan mekanisme partisipatif yang nyata agar kebijakan berkelanjutan tidak hanya berhenti pada tataran wacana, melainkan benar-benar terwujud dalam praktik pemerintahan dan keseharian masyarakat lokal.

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa transformasi pelayanan publik di Raja Ampat masih bersifat adaptif dan belum sepenuhnya terlembaga dalam praktik tata kelola. Hasil ini berbeda dengan penelitian Karjuni Dt. Maani (n.d.) yang menekankan bahwa transparansi dan akuntabilitas adalah prasyarat utama bagi efektivitas kolaborasi lintas sektor. Penelitian ini juga bertolak belakang dengan temuan Fachruddin et al. (2023) yang menggarisbawahi pentingnya integrasi antara pemerintah dan masyarakat untuk menciptakan tata kelola berkelanjutan berbasis kolaborasi. Sementara itu, penelitian Asnawi dan Sa'diyah (2025) menegaskan bahwa komitmen pemerintah yang konsisten terhadap prinsip partisipatif menjadi fondasi utama keberhasilan pelayanan publik di era desentralisasi.

E. KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa konflik kebijakan antara hilirisasi pertambangan dan pariwisata berkelanjutan di Raja Ampat telah menimbulkan krisis pelayanan publik, terutama dalam aspek transparansi, partisipasi masyarakat, dan perlindungan hak-hak adat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelayanan publik belum berfungsi sebagai sarana demokratis yang menjamin keadilan dan kesejahteraan masyarakat, melainkan masih menjadi instrumen kebijakan yang cenderung berpihak pada kepentingan ekonomi industri. Temuan ini mengonfirmasi bahwa tujuan penelitian tercapai, yakni memahami bagaimana pelayanan

publik beroperasi di tengah benturan kepentingan ekonomi dan konservasi, sekaligus menegaskan kontribusi penelitian ini dalam menawarkan perspektif baru tentang pentingnya collaborative governance dalam menjaga keseimbangan antara pembangunan dan pelestarian lingkungan.

Penelitian ini memberikan saran praktis kepada pemerintah pusat dan daerah untuk memperkuat transparansi, melibatkan masyarakat adat dalam setiap proses perizinan, serta mengintegrasikan prinsip keberlanjutan dalam kebijakan publik. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan menggunakan pendekatan partisipatif dengan melibatkan masyarakat lokal secara langsung untuk menggali persepsi dan pengalaman mereka dalam pelayanan publik. Keterbatasan penelitian ini terletak pada keterbatasan data primer lapangan yang dapat diperluas dengan metode etnografi atau survei komunitas. Implikasi kebijakan dari hasil penelitian ini menekankan perlunya pembentukan model tata kelola pariwisata berkelanjutan berbasis pelayanan publik yang inklusif, adil, dan berkeadilan ekologis.

REFERENSI

- Asnawi, S. A. Z., & Sa'diyah, S. S. (2025). Optimalisasi pelayanan publik berbasis partisipasi masyarakat di Kelurahan Gelam Kota Serang. *Jejak Digital: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(5), 3317–3321. <https://doi.org/10.63822/18vtdb96>
- Baxter, P., & Jack, S. (2008). Qualitative case study methodology: Study design and implementation for novice researchers. *The Qualitative Report*, 13(4). <https://doi.org/10.46743/2160-3715/2008.1573>
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (4th ed.). Sage. https://spada.uns.ac.id/pluginfile.php/510378/mod_resource/content/1/creswell.pdf
- Denhardt, J. V., & Denhardt, R. B. (2015). *The New Public Service: Serving, not Steering* (ed. ke-4). Routledge. https://api.pageplace.de/preview/DT0400.9781317486923_A24325937/preview-9781317486923_A24325937.pdf
- Doni, S., Sari, R. P., & Lubis, S. M. (2023). Partisipasi masyarakat dalam mewujudkan pelayanan publik berkualitas di Kabupaten Labuhanbatu. *Jurnal Pembangunan Nagari*, 8(1), 38–53. <https://doi.org/10.30559/jpn.v8i1.347>
- Fachruddin, S., Asriani, & Ode Rosmina, W. (2023). Akuntabilitas dan transparansi pelayanan publik dalam perspektif masyarakat pada kependudukan dan pencatatan sipil daerah. *JIMSH*, 5(2), 126–140. <https://journal.umkendari.ac.id/jimsh/article/view/401>
- Guetterman, T. C. (2015). Descriptions of sampling practices within five approaches to qualitative research in education and the health sciences. *Forum Qualitative Sozialforschung / Forum: Qualitative Social Research*, 16(2). <https://www.qualitative-research.net/index.php/fqs/article/download/2290/3826/9645>
- Herdiana, N. A., & Humaedi, S. (2024). Kepuasan pengunjung terhadap pengelolaan wisata konservasi penyu di Kampung Gag, Kabupaten Raja Ampat. *Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial*, 7(1). <https://doi.org/10.24198/focus.v7i1.53744>
- Hidayati, K. (2021). Harmonisasi pariwisata dengan konservasi: Suatu upaya membangun pariwisata yang berkelanjutan di Kabupaten Kayong Utara. *Jurnal Syntax Transformation*, 2(5), 602–615. <https://jurnal.syntaxtransformation.co.id/index.php/jst/article/view/205/305>
- International Journal of Business Law. (2024). Pengelolaan sumber daya alam dalam perspektif hukum tata negara Indonesia. *IJBL*, 3(1). <https://doi.org/10.47709/ijbl.v3i1.4147>

- Jati, W. R. (2021). Manajemen tata kelola sumber daya alam di Indonesia. *Politika: Jurnal Ilmu Politik*, 12(1), 45–56.
<https://ejournal.undip.ac.id/index.php/politika/article/download/4864/4412>
- Karjuni Dt. Maani. (n.d.). Transparansi dan akuntabilitas dalam pelayanan publik. *Jurnal Demokrasi*, Universitas Negeri Padang.
<https://ejournal.unp.ac.id/index.php/jd/article/download/1190/1025>
- Kooiman, J. (2003). *Governing as Governance*. Sage Publications.
<https://philpapers.org/rec/KOOGAG>
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook* (2nd ed.). Sage Publications. <https://www.metodos.work/wp-content/uploads/2024/01/Qualitative-Data-Analysis.pdf>
- Palinkas, L. A., Horwitz, S. M., Green, C. A., Wisdom, J. P., Duan, N., & Hoagwood, K. (2015). Purposeful sampling for qualitative data collection and analysis in mixed method implementation research. *Administration and Policy in Mental Health and Mental Health Services Research*, 42(5), 533–544.
<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4012002/>
- Qasthary, A., Auzan, R., & Alamsyah, M. (2025). Problematika hukum dalam tata kelola sumber daya alam berkelanjutan. *E-Journal Sagita: Mikhayla Law Review*, 2(2), 55–68.
<https://doi.org/10.61579/mikhayla.v2i2.591>
- Rhodes, R. A. W. (1996). *The New Governance*. Retrieved from <https://eclass.uoa.gr/modules/document/file.php/PSPA108/rhodes.pdf>
- Sachs, J. (2015). *The Age of Sustainable Development*. Columbia University Press.
<https://cup.columbia.edu/book/the-age-of-sustainable-development/9780231173155>
- Sunarti, S., Damayanti, M., Esariti, L., Rahdriawan, M., & Medina, N. (2022). Tantangan pengembangan wisata berdasarkan dinamika partisipasi masyarakat Desa Montongsari, Kabupaten Kendal. *Jurnal Pembangunan Wilayah dan Kota*, 18(4), 367–380.
<https://doi.org/10.14710/pwk.v18i4.49740>
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2020). *Economic Development* (12th ed.). Pearson Education.
<https://www.pearson.com/en-us/subject-catalog/p/economic-development/P200000003348/9780137509985>
- Wicaksono, G. S., Subagiyo, A., & Prayitno, G. (2021). Pengaruh partisipasi masyarakat terhadap kesejahteraan penduduk Desa Wisata Krebet. *Planning for Urban Region and Environment Journal (PURE)*, 10(2), 1–10.
<https://purejournal.ub.ac.id/index.php/pure/article/view/88>
- World Commission on Environment and Development (WCED). (1987). *Our Common Future*. Oxford University Press.
<https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/5987our-common-future.pdf>
- Yin, R. K. (2018). *Case Study Research and Applications: Design and Methods* (6th ed.). Sage Publications. <https://uk.sagepub.com/en-gb/eur/case-study-research-and-applications/book250150>